

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Good Governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good governance* menjadi salah satu isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan sistem administrasi publik saat ini. Adanya peningkatnya pengetahuan dan pendidikan di masyarakat disertai pengaruh dari globalisasi menyebabkan banyaknya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah mengenai sistem tata kelola pemerintahan yang baik, dimana hal ini disebut *good governance*.

Kepemerintahan yang baik merupakan harapan atau dambaan dari semua masyarakat kepada pemerintahnya termasuk masyarakat Indonesia. Terwujudkannya pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai terwujudnya sistem pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menyelesaikan berbagai tuntutan perubahan yang efektif sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, adanya penurunan dalam angka kasus korupsi, dan dapat memenuhi kepentingan publik.

Sampai saat ini *good governance* diasumsikan menjadi garis terdepan dalam masyarakat sebagai kebutuhan yang mutlak bagi keberlangsungan kehidupan sosial, dan perkembangan ekonomi. Pemerintahan yang masih belum baik menjadi sumber kekhawatiran di dalam masyarakat. Adanya kekhawatiran dari masyarakat tersebut

dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan dalam pemerintah saat ini yang begitu rumit dan semakin penuh sarat seperti adanya kepentingan politik, kasus KKN, ketidakadilan hukum, kurangnya integritas dan transparansi dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintah yang mengimplementasikan *good governance* dapat diartikan penyelenggaraan pemerintah tersebut telah mendasari pada prinsip – prinsip partisipasi, pemerintahan yang berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategi, dan saling keterkaitan. Dalam penerapan *good governance* hal utama yang perlu diterapkan adalah adanya perubahan yang signifikan terutama hal yang menyangkut dengan peran pemerintah. Penerapan prinsip – prinsip *good governance* sangat diperlukan dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Pada hakikatnya *good governance* adalah bagaimana pemerintah, swasta dan masyarakat berkolaborasi dalam mengelola negara dengan berdasarkan asas – asas umum penyelenggaraan pemerintah. *Good governance* selalu berkaitan dengan sebuah pekerjaan, terutama kinerja aparatur pemerintah yang baik sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur harus secara optimal. Organisasi atau instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan kualitas aparatur yang baik sehingga adanya kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Pada sekitar tahun 1990, *Good Governance* mulai dikenal lebih dalam lagi di Indonesia. *Good Governance* dijadikan sebagai bahan atau wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan diskusi penelitian, dan seminar, baik itu di

lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lingkungan para akademisi. Pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis, Indonesia inisiatif memulai untuk mempromosikan atau memperkenalkan *Good Governance* dengan berbagai rancangan. Hal tersebut merupakan awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan – gagasan yang mengarah pada perbaikan sistem pemerintah dan demokrasi partisipasi di Indonesia.

Upaya pelaksanaan *good governance* ini merupakan salah satu unsur yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terlaksanakannya *good governance* adalah salah satu syarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – cita suatu bangsa dan negara. Dalam konsep *good governance*, negara memiliki peran yaitu memberikan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang dapat tercantum dalam rencana strategi suatu organisasi atau instansi.

Pemerintah sebagai organisasi publik dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tanggap terhadap lingkungannya, dengan memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut.

Kinerja aparatur pemerintah adalah faktor yang terpenting dan paling menentukan dalam sistem pemerintahan. Kinerja yang merupakan sebuah gambaran mengenai kemampuan kerja serta tingkat pencapaian pelaksanaan sebuah

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Aparatur pemerintah merupakan elemen yang dapat mengukur kinerja di dalam organisasi sektor publik. Kesadaran para aparatur pemerintah beserta pimpinannya akan berpengaruh pada sistem tata kelola pemerintahan. Baik dan buruknya kinerja para aparatur pemerintah dapat dilihat atau ditentukan dari berbagai faktor, salah satunya penerapan prinsip – prinsip *good governance*.

Kinerja aparatur pemerintah yang mencerminkan prinsip – prinsip *good governance* dapat menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dengan kinerja aparatur pemerintah yang mencerminkan prinsip *good governance* sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi dan terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Konsep *good governance* itu sendiri mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah.

Untuk menuju ke kinerja yang baik, maka harus adanya sesuatu yang dilakukan seperti mempunyai jiwa amanah yaitu : mempunyai integritas yang tinggi, bersikap jujur dan bisa mengemban tugas dengan baik, selain itu harus juga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana cara untuk mengimplementasikannya, menunjukan rasa ingin tau, memahami risiko pekerjaan dan berkomitmen menanggung jawaban hasil kerjanya serta tidak bergantung kepada

orang lain, memiliki pola pikir dan cara pandang yang baik, taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.

Pada kesempatan kali ini peneliti dapat meneliti di Dinas Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) adalah sebuah instansi pemerintah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pendidikan, melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur yang berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Maka dari itu diperlukan kinerja aparatur yang baik dalam pelaksanaan tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Setelah melakukan penjajagan awal atau observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan kinerja aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diantaranya yaitu:

- 1) Ketepatan waktu merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kinerja akan tetapi masih belum diterapkan dengan maksimal.

Saat ini kinerja yang dilakukan oleh aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dipantau dalam sistem aplikasi bernama Tunjangan Remunerasi Kinerja atau TRK. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menduduki posisi terendah di urutan ke – 39 dengan nilai 57.13%.

Sedang instansi pemerintahan yang lain sudah mendapatkan nilai diatas 80%. Salah satu kriteria penilaian adalah presensi menit kehadiran dari aparatur. Sehingga Dinas Pendidikan masih kurang dalam ketepatan waktu

- 2) Inisiatif aparatur yang masih kurang optimal pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan kinerjanya.

Pada saat masa pandemi seperti saat ini, beberapa aparatur diharuskan untuk melaksanakan *work from home* atau bekerja dari rumah. Dengan adanya hal ini para aparatur diharus untuk menguasai perangkat komputer atau perangkat digital lainnya dan tetap bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam sistem aplikasi TRK, masih rendahnya penilaian untuk Dinas Pendidikan sebab masih adanya apartur yang tidak melaporkan kinerjanya pada sistem sehingga menunjukan masih kurangnya inisatif dari aparatur.

Permasalahan – permasalahan yang diuraikan diatas diduga disebabkan akibat belum dijalankan sepenuhnya prinsip *Good Governance* pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja aparatur masih lemah dan belum menjadi perhatian yang besar terutama di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pertanggungjawabam aparatur kepada publik dalam

konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen, masih kurang maksimal. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya keterbatasan kapabilitas aparatur. Dalam sistem TRK yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan menjadi instansi peringkat terendah.

2. Aturan hukum yang ada belum diterapkan secara maksimal. Berdasarkan sistem TRK terdapat pegawai yang tidak menerapkan aturan dan apabila ada aparatur yang melanggar kemudian hukum yang diberikan berupa disiplin ringan. Hasil pemantau dan evaluasi dari SAKIP menyatakan bahwa belum adanya sanksi yang tegas bagi aparatur yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik atau tidak menerapkan aturan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji penelitian pada Dinas Provinsi Jawa Barat dengan judul **“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA APARATUR DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *good governance* terhadap kinerja aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana upaya dalam menghadapi hambatan yang mempengaruhi pengaruh *good governance* terhadap kinerja aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh data dan menggambarkan informasi mengenai pengaruh *good governance* terhadap kinerja aparatur di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai upaya dalam menghadapi hambatan yang mempengaruhi pengaruh *good governance* terhadap kinerja aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori – teori

yang sudah peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mempertimbangkan dan sumbangan pikiran yang bermanfaat mengenai studi kasus yang menyangkut tentang Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Aparatur di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat